



**PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK), INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN PENGANGGURAN
TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI
JAWA TIMUR PERIODE 2006 – 2013**

SKRIPSI

Oleh :

**AHMAD FATHUL LUTFI
NIM 110810101065**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK), INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN PENGANGGURAN
TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI
JAWA TIMUR PERIODE 2006 – 2013**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

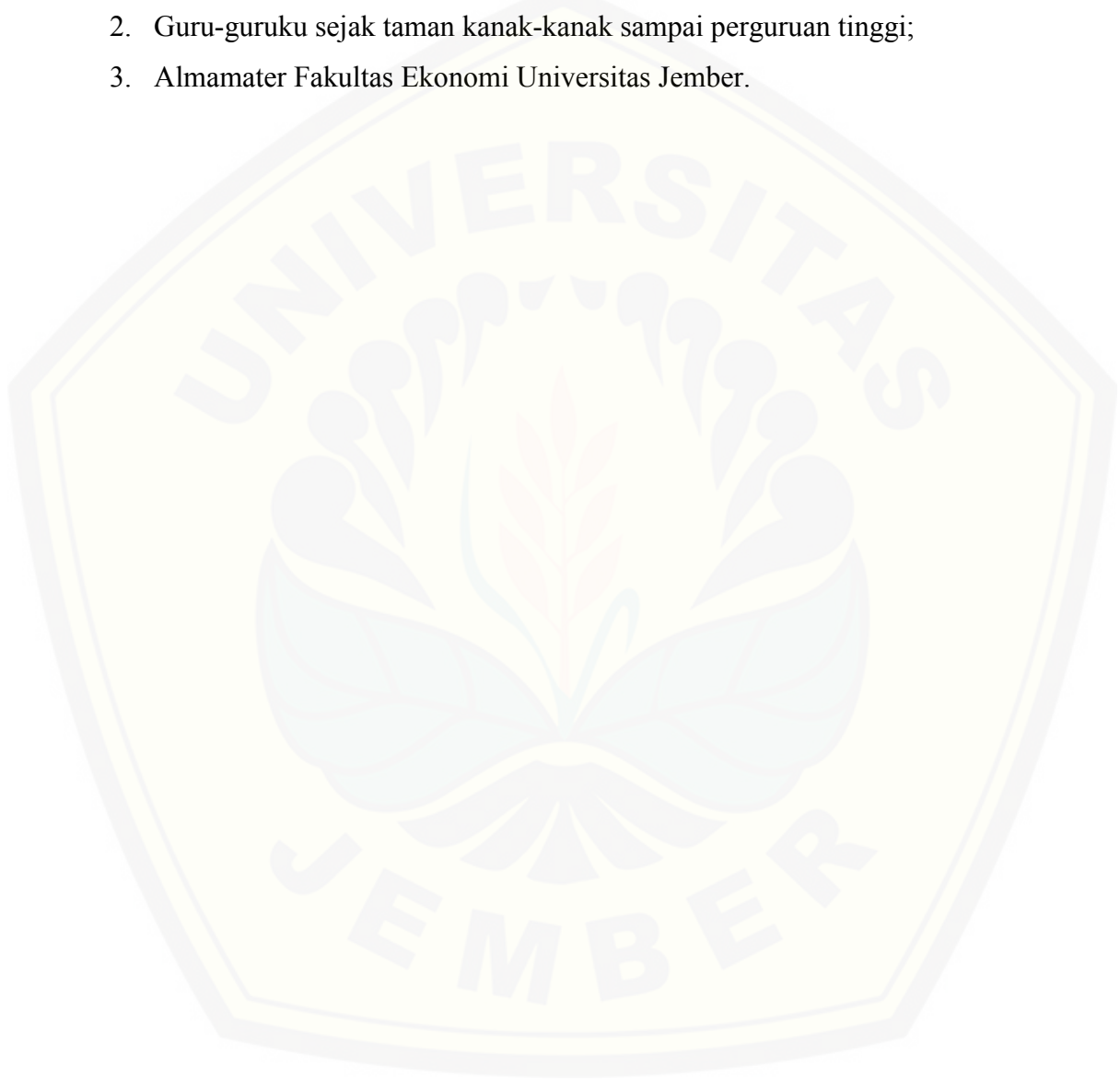
**AHMAD FATHUL LUTFI
NIM 110810101065**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Umi Nikmah dan Ayahanda Achmad Jumadi yang tercinta;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.



MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Surat Ar-Ra'd ayat 11)

Tidak ada manusia yang diciptakan gagal, yang ada hanyalah mereka gagal memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya

(HR Tirmidzi)

Pengetahuan adalah harta yang patut dimuliakan, perilaku baik adalah busana baru, dan pikiran adalah cermin yang jernih.

(Imam Ali. AS)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fathul Lutfi

NIM : 110810101065

Menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur periode 2006-2013” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Mei 2016

Yang menyatakan,

Ahmad Fathul Lutfi

NIM: 110810101065

SKRIPSI

**PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK), INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), DAN PENGANGGURAN
TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAWA
TIMUR PERIODE 2006-2013**

Oleh

Ahmad Fathul Lutfi
NIM: 110810101065

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes
Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Lilis Yulianti, SE, M.Si

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran
terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa
Timur Periode 2006-2013

Nama Mahasiswa : Ahmad Fathul Lutfi

NIM : 110810101065

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes
NIP: 19700206 19943 1 002

Dr. Lilis Yuliati, SE, M.Si
NIP: 19690718 199512 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP: 19641108 198902 2 000 1

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK), INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN PENGANGGURAN TERHADAP
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE 2006-2013**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ahmad Fathul Lutfi

NIM : 110810101065

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan penguji tanggal:

13 MEI 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dra. Nanik Istiyani, M. Si. (.....)
NIP. 196101221987022002
2. Sekretaris : Drs. Agus Luthfi, M. Si. (.....)
NIP. 196505221990021001
3. Anggota : Dr. Siswoyo Hari Santosa, S.E., M. Si (.....)
NIP. 196807151993031001

4 x6

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si.
NIP. 19630614 199002 1 001

*Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di
Provinsi Jawa Timur periode 2006-2013*

Ahmad Fathul Lutfi

*Jurursan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi di Indonesia masih menghadapi kenyataan bahwa masih luasnya kemiskinan terutama di pedesaan. Kemiskinan berkaitan erat dengan rendahnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pokoknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan tingkat upah minimum kabupaten/kota, rasio perkembangan indeks pembangunan manusia serta pengangguran yang nantinya apakah berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota dan pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013, akan tetapi indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013.

Kata kunci: Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Jumlah Penduduk Miskin.

Effect of Minimum Wage District/City, Human Development Index (HDI) and Unemployment on Poor Population in East Java Period 2006-2013

Ahmad Fathul Lutfi

Development Economics Departemen, Faculty of Economics, University of Jember

ABSTRACT

Economic development in Indonesia still faces the reality is that the extent of poverty, especially in rural areas. Poverty is closely related to the low incomes that can't meet the needs of life substantially. The purpose of this study was to determine the minimum wage level development districts / cities, the ratio of the development of the human development index and whether unemployment will affect poor population in the province of East Java in 2006-2013. Results of analysis showed that the minimum wage districts / cities and unemployment have a significant effect on poor population in the province of East Java in 2006-2013, but the human development index don't have a significant effect on poor population in East Java province in 2006- 2013.

Key words: Minimum Wage Districts / City, the Human Development Index, Unemployment, Poor Population.

RINGKASAN

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur periode 2006-2013; Ahmad Fathul Lutfi; 110810101065; 2016; 89 halaman; Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Sejak tahun 1970 pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Sejak tahun tersebut muncul pandangan baru yaitu tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Kemiskinan berkaitan erat dengan rendahnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pokoknya. Pada umumnya di negara berkembang masalah pendapatan yang rendah dan kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian dalam tujuan pembangunan ekonomi kedua hal tersebut selalu dinyatakan bersamaan sehingga menjadi satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan.

Pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang murah akan meningkatkan produktivitas penduduk dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Jawa. Jumlah penduduk tersebut juga sejalan dengan jumlah kemiskinan yang terjadi yang pada kenyataannya adalah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki penduduk miskin paling besar dibandingkan provinsi lain di Indonesia

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur meliputi seluruh kabupaten dan kota. Objek penelitian ini yaitu pengaruh upah minimum

kabupaten/kota, indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006 sampai 2013. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi dengan menggunakan data panel dan data *cross section*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai koefisien negatif sebesar 0,000914 terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur meskipun memiliki hubungan yang negatif. Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien positif sebesar 0,008284 terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien positif sebesar 0,641247 terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2006-2013.

Kesimpulan dari skripsi ini menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota dan pengangguran mempunyai pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Sedangkan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh berbalik terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah Azza Wa Jalla, atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur periode 2006-2013”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Jember.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes. selaku Dosen Pembimbing Skripsi terima kasih atas bimbingannya selama penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;
2. Dr. Lilis Yulianti, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi terima kasih atas bimbingannya selama penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;
3. Dra. Nanik Istiyani, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah terima kasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Badan Pusat Statistik Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan banyak bantuan berupa penyediaan data dan sebagainya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Dr. M. Fathorrazi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
6. Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
7. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Jember, terima kasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa;
8. Ibunda Umi Nikmah dan Ayahanda Achmad Jumadi yang telah membimbing dari kecil dan sekarang hingga dewasa;
9. KH. Abdul Haq Moedjammil Hasba beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hasan terima kasih telah membimbing saya selama ini berupa ilmu agama;

10. Adik Choyrun Nisak, Rosyidah, Iqballu Shofi, Janoko dan sepupu saudara di rumah Telengsari, terima kasih atas dukungan dan doanya;
11. Keluarga di Cilacap kakek dan nenek, dan keluarga di Jakarta Paman, Bibi, dan saudara-saudara saya, terima kasih atas dukungannya;
12. Teman-teman di Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan angkatan 2011, terima kasih telah menjadi teman yang baik selama penulis menjadi mahasiswa;
13. Rekan-rekan dikonsentrasi ESDM 2011, Yuli Arifin, Johan, Fredi, Adit dan teman-teman dikonsentrasi lainnya Amar, Fahmi Ojik, Muzakki, Iqbal, Fawaid, Pamungkas dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
14. Guru dan teman TK Darun Najah angkatan 1999, MIMA KH. Shiddiq Jember angkatan 2005, MTs. Bustanul Ulum angkatan 2008, dan SMK Al-Hasan angkatan 2011;
15. Sahabat-sahabat terbaik saya Mas Halim, Mas Taufiq, Dayat, Doni, Bang Upik, Gale, Eko, Cak Mon, Fais, Gus Aad, Didin, dan Fais terima kasih atas motivasinya;
16. Keluarga di kelompok KKN 26 Desa Sucolor Kec. Maesan Kab. Bondowoso, Patria, Sofyan, Tedy, Reski, Goben, Rizna, Chika, Amel dan Laila;
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengkarapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat dijadikan salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya.

Jember, 6 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Tinjauan Kemiskinan	6
2.1.2 Upah Minimum	9
2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia	12
2.1.4 Pengangguran	14
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	16

2.3 Kerangka Konseptual	18
2.4 Hipotesis	19
BAB 3. METODE PENELITIAN	20
3.1 Rancangan Penelitian	20
3.1.1 Jenis Penelitian	20
3.1.2 Unit Analisis	20
3.1.3 Jenis Sumber Data	20
3.2 Teknik Pengumpulan Data	20
3.3 Metode Analisis Data	21
3.3.1 Analisis Regresi Data Panel	21
3.3.2 Uji Kesesuaian Model	24
3.3.3 Uji Statistik	24
3.3.4 Uji Asumsi Klasik	26
3.4 Definisi Variabel Operasional	31
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum	33
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur	33
4.1.2 Kondisi Penduduk Miskin di Jawa Timur	35
4.1.3 Kondisi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur	36
4.1.4 Kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur	38
4.1.5 Kondisi Pengangguran di Jawa Timur	40
4.2 Analisis Data	41
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	41
4.2.2 Analisis Regresi Data Panel	42
4.2.3 Hasil Analisis Data Panel dengan <i>Fixed Effect</i>	44
4.2.4 Uji Statistik	53
4.2.5 Uji Asumsi Klasik	57

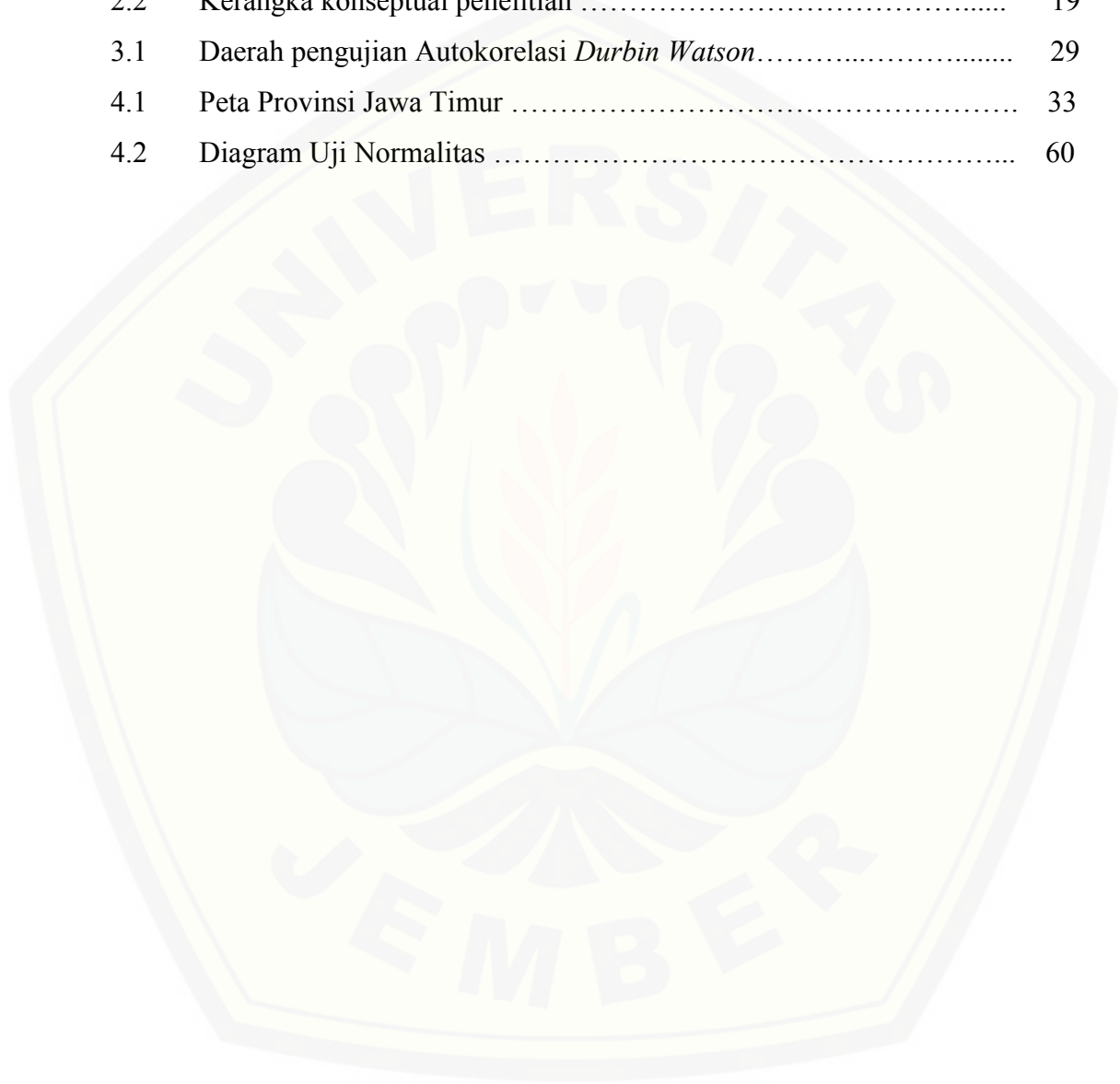
4.3 Pembahasan	61
4.3.1 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur	61
4.3.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur	62
4.3.3 Pengaruh Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur	63
BAB 5. PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2006-2013	2
1.2 Jumlah Kemiskinan terbanyak 5 Provinsi di Indonesia Tahun 2013 ..	3
1.3 Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur tahun 2006-20013	4
2.1 Tinjauan penelitian sebelumnya	17
3.1 Kriteria Pengujian <i>Durbin-Watson</i>	29
4.1 Administrasi Jawa Timur	34
4.2 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2013.....	35
4.3 Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2013.....	37
4.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2013	38
4.5 Pengangguran Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2013	40
4.6 Hasil Uji Hausman Test	42
4.7 Hasil Uji Redudent Fixed Effect	43
4.8 Hasil Pendekatan Fixed Effect	44
4.9 Hasil Uji F	54
4.10 Hasil Uji t	55
4.11 Hasil Uji R^2	56
4.12 Hasil Uji Multikolinearitas korelasi sederhana	57
4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas	58
4.14 Hasil Uji Autokorelasi	59
4.15 Hasil Uji Normalitas	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Lingkaran setan kemiskinan	7
2.2 Kerangka konseptual penelitian	19
3.1 Daerah pengujian Autokorelasi <i>Durbin Watson</i>	29
4.1 Peta Provinsi Jawa Timur	33
4.2 Diagram Uji Normalitas	60



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Data Penelitian	71
B. Uji Data Panel	79
C. Analisis Regresi Data Panel	81
D. Uji F	83
E. Uji t	84
F. Koefisien Determinasi	85
G. Uji Multikolinearitas	86
H. Uji Heterokedastisitas	87
I. Uji Autokorelasi	88
J. Uji Normalitas	89

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1970 pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Sejak tahun tersebut muncul pandangan baru yaitu tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro, 2004 dalam Masjkuri, 2007: 31). Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut pembangunan suatu negara boleh dikatakan tidak berhasil apabila tidak dapat mengurangi kemiskinan, memperkecil ketimpangan pendapatan serta menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduknya. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya menggunakan tolok ukur ekonomi saja melainkan juga harus didukung oleh indikator-indikator sosial (non ekonomi), antara lain seperti tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, kondisi-kondisi dan kualitas pelayanan kesehatan, kecukupan akan kebutuhan perumahan.

Pembangunan ekonomi di Indonesia masih menghadapi kenyataan bahwa masih luasnya kemiskinan terutama di pedesaan. Kemiskinan berkaitan erat dengan rendahnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pokoknya. Pada umumnya di negara berkembang masalah pendapatan yang rendah dan kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian dalam tujuan pembangunan ekonomi kedua hal tersebut selalu dinyatakan bersamaan sehingga menjadi satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional maka persoalan pendapatan perkapita dari distribusi pendapatan merupakan dimensi yang perlu mendapat perhatian terutama untuk melihat tingkat pendapatan pembagian pendapatan di antara warga masyarakatnya yaitu siapa mendapat berapa dan siapa yang beruntung. Aspek ini semakin menarik, terutama di wilayah pedesaan. Berbicara perihal kemiskinan, maka

secara implisit langsung maupun tidak langsung telah membicarakan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. (Suhardjo, 1997: 69-86).

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan sosial yang sangat kompleks dan harus segera mendapat formula yang tepat agar dapat terurai. Indonesia sebagai Negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang besar tidak dapat terhindar dari masalah tersebut. Ini dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin yang begitu besar, yang mayoritas tinggal di daerah pedesaan yang sulit untuk diakses. Kemiskinan dapat diartikan sebagai dimana seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan berbagai penyebab salah satunya adalah rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia relatif masih sangat tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada bulan September 2014 menggambarkan bahwa penduduk miskin di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Tercatat pada tahun 2004 penduduk miskin berjumlah 36,5 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2005 turun menjadi 35,1 juta jiwa, tetapi pada tahun 2006 penduduk miskin mengalami peningkatan kembali sebesar 39,3 juta jiwa. Namun pada tahun 2017 hingga 2013 jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan yakni berjumlah 28,5 juta jiwa. Hasil tersebut tercapai karena adanya peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2006-2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)
2006	39,3
2007	37,17
2008	34,96
2009	32,35
2009	32,35
2010	31,02
2011	30,01
2012	28,59
2013	28,55

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2014.

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Berdasarkan keterangan tabel bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia tiap tahunnya mengalami penurunan, meskipun begitu jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar. Perlu upaya-upaya secara serius dari pemerintah pusat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin sehingga di Indonesia bebas dari masalah kemiskinan seperti yang kita harapkan.

Pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang murah akan meningkatkan produktivitas penduduk dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Jawa. Jumlah penduduk tersebut juga sejalan dengan jumlah kemiskinan yang terjadi yang pada kenyataannya adalah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki penduduk miskin paling besar dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2: Jumlah Kemiskinan Terbanyak 5 Provinsi di Indonesia Tahun 2013

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase (%)
Jawa Timur	4.865.820	12,73
Jawa Tengah	4.704.870	14,44
Jawa Barat	4.382.650	9,61
Sumatera Utara	1.390.800	10,39
Lampung	1.134.280	14,39

Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Pada akhir 2013 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kemiskinan yang relatif cukup tinggi yaitu sebesar 4.856.820 dengan presentase 12,73% dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 419428,45 milyar dan lebih tinggi dari periode tahun sebelumnya (BPS:2013).

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur tahun 2006-2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)
2006	7,67
2007	7,15
2008	6,54
2009	5,86
2010	5,57
2011	5,22
2012	4,99
2013	4,89

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2014.

Tabel 1.3 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Menurut hasil dari BPS, tahun 2013 penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sebesar 4,89 juta jiwa penduduk. Jumlah ini masih tergolong cukup besar mengingat Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang menyumbang pendapatan Negara yang cukup besar. Namun jika dilihat pada tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 cenderung menurun. Dengan demikian perlu peningkatan kinerja dari pemerintah provinsi untuk lebih memperhatikan dan peduli terhadap masyarakat miskin, sehingga pada masa yang akan datang tercipta perubahan terhadap perkembangan Provinsi Jawa Timur, sehingga yang nantinya bisa menjadi percontohan di provinsi lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur ?
2. Seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur ?
3. Seberapa besar pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur ?

4. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh upah minimum kabupaten/kota, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian :

Selain terdapat tujuan, dalam penelitian ini juga terdapat beberapa manfaat baik itu manfaat yang akan didapat oleh pembaca ataupun manfaat secara ilmiah, antara lain:

1. Bagi pemerintah, sebagai acuan pengambilan kebijakan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.
2. Manfaat ilmiah, untuk memahami dan mendalami permasalahan di bidang ekonomi khususnya permasalahan kemiskinan.
3. Manfaat akademisi, dapat menjadi informasi, wacana dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian mengenai obyek yang sama.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan Kemiskinan.

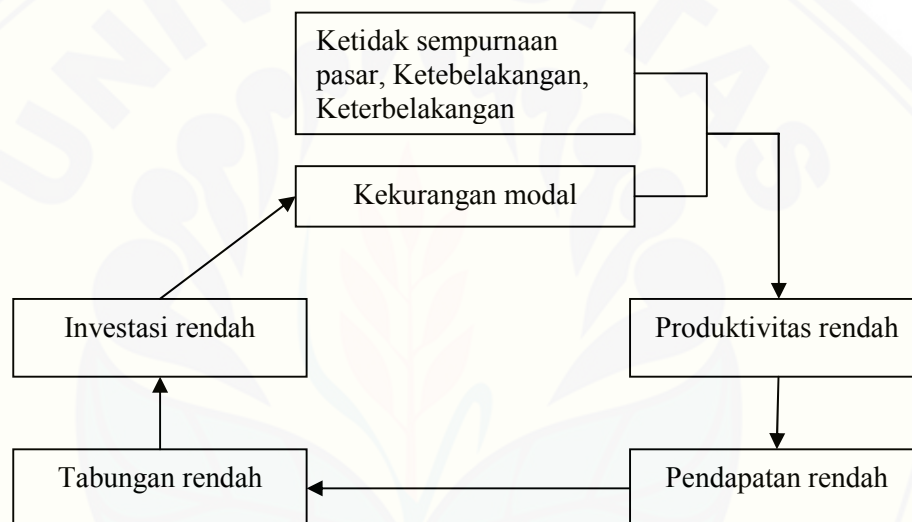
Memerangi kemiskinan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi. Secara umum kemiskinan mempunyai arti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik. (Tjiptoherijanto, 1997:76). Menurut Lewis, A (dalam Suparlan, 1995:5), memandang kemiskinan dan cirri-cirinya sebagai suatu kebudayaan atau sebagai suatu sub kebudayaan dengan struktur dan hakikatnya yang tersendiri, yaitu sebagai suatu cara hidup yang diwarisi dari generasi ke generasi melalui garis keluarga. (Suparlan, 1993:4-5) Pandangan ini menyatakan bahwa kebudayaan kemiskinan di negara-negara modern bukan hanya menyangkut masalah kelumpuhan ekonomi, masalah disorganisasi atau masalah kelangkaan sumber daya, melainkan di dalam beberapa hal juga bersifat positif karena memberikan jalan ke luar bagi kaum miskin untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya. Selanjutnya Lewis, mendefinisikan kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis, dan berciri kapitalisme.

1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan.

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000:107) sebagai berikut :

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah;
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah ;
- c. Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal.

Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) lihat Gambar 2.1. Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berakibat pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada ketebelakangan dan seterusnya. Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000) yang mengemukakan bahwa Negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*).



Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*)
Sumber : Nurkse (1953) dalam Kuncoro, (2000)

Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu negara menjadi miskin karena ia merupakan negara miskin” (*A Country is poor because it is poor*). Menurut pendapatnya, inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang besar. Di satu sisi pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan sebagai

pendorongnya adalah investasi. Di negara berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang besar. Jadi menurut Nurkse terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi Negara berkembang mencapai tingkat pembangunan yang pesat.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Setiap permasalahan timbul pasti karena ada faktor yang mengiringinya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Hudyana (2009: 28-29) yaitu :

a. Pendidikan yang Terlampau Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

b. Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

c. Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.

d. Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

e. Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

f. Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

3. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang terus dilaksanakan pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah dan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya (LSM, Perguruan Tinggi, dunia usaha, Organisasi Keagamaan, dan masyarakat miskin). Selain itu juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memenuhi kesepakatan global dalam pencapaian sasaran MDGs tahun 2015. (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2014: 21).

Faktor eksternal yang mempengaruhi upaya penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia seperti kenaikan inflasi karena depresiasi nilai tukar rupiah dan ketidakstabilan harga minyak bumi sebagai akibat bencana alam maupun krisis politik di Timur Tengah. Sementara faktor internal seperti kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan terjadinya bencana alam nasional yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan perekonomian rakyat. Secara agregat, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari 28,59 juta jiwa pada bulan September 2012 menjadi 28,55 juta jiwa pada bulan September 2013.

2.1.2 Upah Minimum

Kebijakan upah minimum telah menjadi isu yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum

dari pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum adalah untuk (a) menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, (b) meningkatkan produktivitas pekerja, (c) mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2003: 38).

Upah dan pengangguran memiliki keterkaitan yang cukup erat dimana tinggi rendahnya upah akan mempengaruhi jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja yang pada akhirnya akan berdampak pada jumlah pengangguran. Upah merupakan pembayaran jasa-jasa fisik maupun mental kepada tenaga kerja. Upah uang yaitu jumlah uang yaitu diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik yang digunakan dalam proses produksi. (Sukirno dalam Yogatama, 2010: 24).

Sistem pengupahan mengandung tiga prinsip yaitu:

1. Pemberian imbalan atau nilai pekerjaan
2. Penyediaan intensif
3. Jaminan kebutuhan buruh

Upah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penawaran dan permintaan tenaga kerja, adanya perubahan upah akan mempengaruhi besar kecilnya penawaran tenaga kerja, sesuai dengan hukum penawaran bahwa tingkat upah yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Jika tingkat upah relatif rendah maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan menjadi sedikit.

Teori Upah Alam, dari David Ricardo Teori ini menerangkan:

1. Upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya.
2. Di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. (Mankiw, 2006: 160).

Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

Kaufman (dalam Khabhibi, 2010: 49), tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan. Peran pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Tidak bisa hanya pengusaha saja yang harus menanggung dampak penetapan upah minimum ini. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerjasama dari semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial ini maka dapat dicapai tujuan bersama yaitu pekerja/buruh sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (1990) dalam Saputra (2011), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*"a process of enlarging peoples's choices"*). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah manusia sebagai aset negara yang sangat berharga. Definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonominya.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar manusia yaitu:

1. Lamanya hidup yang diukur menurut harapan hidup pada saat lahir.
2. Tingkat pendidikan yang diukur dengan mengkombinasikan antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua pertiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga)
3. Tingkat kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah).

Indeks ini pertama kali diperkenalkan pada 1990 oleh ekonom Pakistan bernama Mahbub Ul Haq. Formula perhitungan IPM adalah sebagai berikut (Mirza, 2012: 4):

$$IPM = \frac{1}{3}(X1 + X2 + X3) \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana:

X1 = Lamanya hidup

X3 = Tingkat kehidupan yang layak

X2 = Tingkat pendidikan

Indeks harapan hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah dengan menggunakan angka kelahiran dan kematian per tahun. Hal ini diharapkan akan dapat mencerminkan

rata-rata lama hidup sekaligus tingkat kesehatan masyarakat. Dalam perhitungan indeks pendidikan menggunakan dua indikator yaitu angka melek huruf rata-rata lama sekolah (MYS). Angka melek huruf merupakan kemampuan dalam membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan jumlah orang yang sekolah dikalikan dengan lama sekolah kemudian dijumlahkan dan dibagi 20 (total lama sekolah). Setelah memperoleh nilai Lit dan MYS dilakukan penyesuaian agar memiliki nilai pada skala 0 dan 1. Kemudian nilai kedua indikator tersebut dihitung dengan ketentuan UNDP dan dijadikan indeks pendidikan dengan perbandingan bobot Lit 2 dan MYS 1.

$$IP = \frac{2}{3} \text{ indeks Lit} + \frac{1}{3} \text{ indeks MYS} \dots\dots\dots (2.2)$$

Untuk mengukur standar hidup layak menggunakan *real* perkapita GDP *adjusted*. Hal ini dikarenakan apabila menggunakan PDRB perkapita maka yang diukur hanya produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli *rill* masyarakat. Pengukuran daya beli masyarakat antar provinsi atau kabupaten/kota menggunakan data dari BPS yang berupa rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar sebanding dengan daerah lain (Franclari, 2012: 63). Penyesuaian dengan indeks PPP berdasarkan ketentuan UNDP adalah sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita pertahun untuk 27 komoditi dari Susenas Kor yang telah disesuaikan (=A)
2. Menghitung nilai pengeluaran *rill* (=B) dengan membagi rata-rata pengeluaran (A) dengan IHK tahun berangkutan
3. Metode perhitungan disesuaikan dengan menstandarkan GNP perkapita agar sebanding dengan indeks kemahalan wilayah yang disebut dengan daya beli per unit (PPP/unit). Data yang digunakan adalah data kuantum perkapita pertahun dari suatu komoditi yang terdiri dari 27 komoditi tersebut.

Perhitungan PPP dapat digunakan rumus berikut:

$$\text{PPP/unit} = \text{Ri} \frac{\sum_{j=1}^{27} E(i,j)}{\sum_{j=1}^{27} P(i,j)Q(i,j)}$$

Dimana:

$E(i,j)$ = pengeluaran untuk komoditi j di kabupaten/kota

$P(i,j)$ = harga komoditi j kabupaten/kota i

$Q(i,j)$ = jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di kabupaten/kota i

Tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pada komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang. Pemerintah memiliki peran sangat penting sebagai penyusun kebijakan yang sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Anand, 1993 dalam Suryati, 2015: 21).

2.1.4 Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika dalam kegiatan produktif yaitu menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja ini terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja (employed persons) merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang tergolong siap bekerja dan mencari pekerjaan termasuk dalam golongan menganggur. Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja maupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi.

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. (Kaufman, 1999: 55). Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam

angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 1994: 43).

Bentuk pengangguran :

Menurut Edward (1974) dalam buku Ekonomi Pembangunan (Arsyad, 1999: 35)

Pengangguran dibagi kedalam 5 Bentuk:

1. Pengangguran terbuka : baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan).
2. Setengah menganggur (underemployment): yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka biasa kerjakan.
3. Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh: yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, termasuk di sini adalah:
 - a. Pengangguran tak kentara (disguised unemployment) Misalnya para petani yang bekerja di lading selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu selama sehari penuh.
 - b. Pengangguran tersembunyi (hidden unemployment) Misalnya oaring yang bekerja tidak Sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.
 - c. Pensiun lebih awal
4. Tenaga kerja yang lemah (impaired): yaitu mereka yang mungkin bekerja full time, tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
5. Tenaga kerja yang tidak produktif : yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif tetapi karena sumber daya-sumber daya penolong kurang memadai maka mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan baik.

Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali, jika suatu masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan atau kesejahteraanya tinggi, namun di dalam masyarakat ada juga yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran secara otomatis akan mengurangi kesejahteraan suatu masyarakat yang secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. (Sukirno dalam Yogatama, 2010: 34), efek buruk dari pengangguran

adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Adit Agus Prastyo (2010) "*Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)*" Alat Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Variabel bebasnya yaitu: Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat kemiskinan. Hasil yang didapat adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007.

Penelitian Cholili Fatkhul Mufid "*Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)*" menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu pengangguran, PDRB, dan IPM. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil yang didapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Cholili antara lain; (1) pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia, (2) Produk domestik bruto regional berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia, dan (3) Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk di Indonesia.

Penelitian mengenai kemiskinan juga pernah dilakukan oleh Barika (2013) dengan judul "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera*" yang menggunakan 4 (empat) variabel yaitu pertumbuhan ekonomi,

pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran, dan laju inflasi dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil yang didapat dalam penelitiannya antara lain; (1) pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera, (2) pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan, (3) pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera, dan (4) Inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera.

Indra Wiguna Van (2013) “*Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010*”. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu PDRB, pendidikan, dan pengangguran dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dalam penelitiannya diantara lain; (1) PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, (2) pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, dan (3) pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Tabel 2.1 Tinjauan penelitian sebelumnya

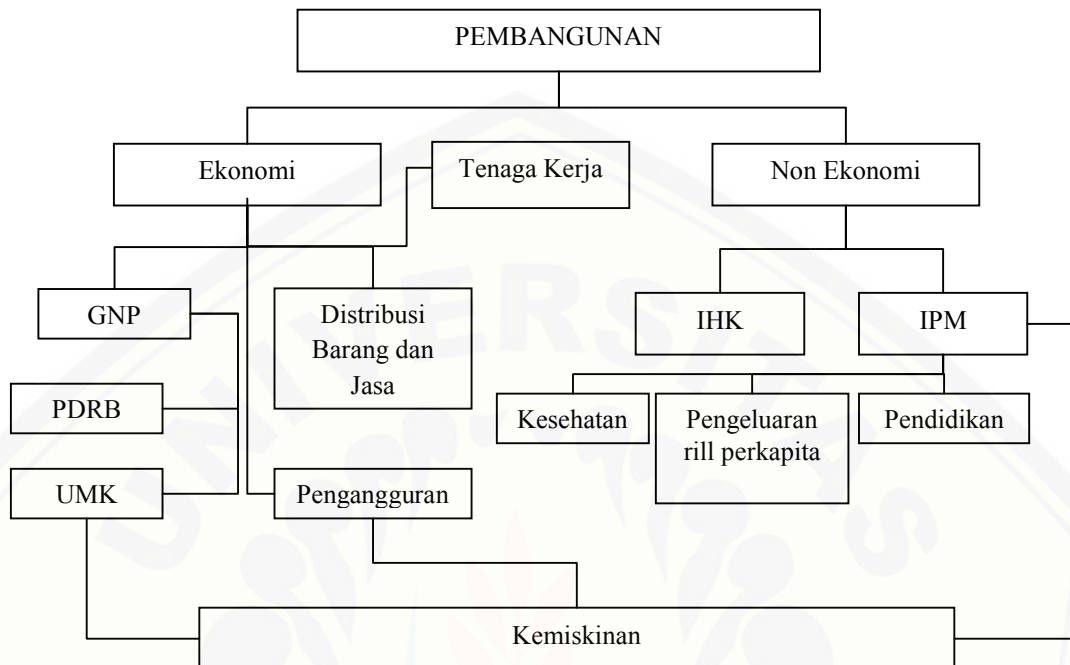
No	Nama	Judul	Metode	Hasil Analisis
1	Prastyo 2010	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan	Regresi Linier berganda	Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
2	Fatkhul 2014	Analisis Pengaruh Pengangguran, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)	Regresi linier berganda	PDRB berpengaruh positif namun tidak signifikan, IPM berpengaruh negatif namun signifikan, sedangkan Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah penduduk miskin di

				Indonesia
3	Barika 2013	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera	Regresi linier berganda	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan, Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia
4	Indra 2013	Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010	Regresi linier berganda	PDRB berpengaruh negatif dan signifikan, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan, dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka pemikiran yang terfokus pada tujuan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas maka dapat dibuat kerangka konseptual untuk memudahkan alur dalam penelitian mengenai masalah kesenjangan kemiskinan antar Kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Timur. Diawali tentang kesenjangan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, Dengan adanya kesenjangan pada masyarakat maka timbul permasalahan yang baru yaitu masalah kemiskinan. Dengan masalah jumlah kemiskinan yang tinggi maka peneliti mencoba menganalisa permasalahan yang terjadi dengan menggunakan variabel-variabel bebas seperti UMK, IPM dan Pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan variabel-variabel bebas tersebut diharapkan mampu mengurangi jumlah kemiskinan yang

terjadi di Jawa Timur sehingga tercipta kesejahteraan yang merata pada masyarakat di Provinsi Jawa Timur.



2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2006-2013.
- Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2006-2013.
- Pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2006-2013.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian.

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan *explanatory* yaitu suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Dalam metode penelitian *explanatory* ini menjelaskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti (Nasir, 1998: 45).

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013.

3.1.3 Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Cakupan penelitian adalah seluruh kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu 38 kabupaten/ kota, dengan series 8 tahun dari tahun 2006 hingga tahun 2013 dengan jumlah keseluruhan 304 data panel yang merupakan penggabungan data *cross section* dan *time series*. Sumber data diperoleh berasal dari BPS.

3.2 Teknik Pengumpulan Data.

Data yang diperoleh dilakukan dengan cara menyalin data yang telah ada sebelumnya dengan cara mendatangi instansi terkait secara langsung ataupun secara tidak langsung (melalui internet, buku, jurnal dan lain sebagainya). Data yang diperoleh berasal dari BPS.

3.3 Metode Analisis Data

Pada umumnya, regresi data panel berbeda dengan regresi biasanya. Dalam regresi data panel terdapat tahapan penentuan model estimasi yang harus dilalui. Tahapan tersebut, antara lain; *pertama* penentuan analisis regresi data panel terdiri dari (1) *Fixed Effect Model* (FEM) dan (2) *Random Effect Model* (REM). Setelah dilakukan analisis regresi data panel, tahap *kedua* yang harus dilakukan adalah penentuan uji kesesuaian model dengan *Hausman test* atau uji Hausman. Tahap *ketiga* yaitu melakukan uji statistic diantaranya adalah uji parsial t (uji t), uji simultan F (uji F) dan uji R^2 . Kemudian, tahap terakhir yaitu tahap ke *empat* yang dilakukan dalam metode analisis data adalah uji asumsi klasik (uji multikolinearitas), uji heteroskedastistik, uji auto korelasi dan uji normalitas).

3.3.1 Analisis Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan antara data berkala (*time series*) dan data individual (*cross section*). Data panel juga biasa disebut data terkelompok (*pooled data*), kombinasi berkala (kumpulan data berkala dan individual), data mikropanel, data bujur (*longitudinal data*) atau studi sekian waktu pada sekelompok objek penelitian, analisis riwayat peristiwa (*event history analysis*) atau studi sepanjang waktu dari sekumpulan objek sampai mencapai keberhasilan atau kondisi tertentu (Setiawan dan Dwi Endah, 2010 dalam Hasnuri, 2014: 9).

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 38 kabupaten periode 2006-2013, dimana pada masing-masing kabupaten runtun waktu tersebut terdapat tiga variabel bebas yaitu, UMK, IPM, dan pengangguran, maka jenis penelitian ini adalah panel data. Kelebihan data panel dibandingkan dengan data berkala dan data individual yaitu (Gujarati, 2012 dalam Mariska, 2015: 34):

1. Data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, Negara, provinsi, dan lain-lain selama beberapa waktu dengan batasan heterogenitas dalam setiap unitnya.
2. Dengan mengombinasikan data berkala dan data individual, data panel memberikan data yang lebih informative, lebih variatif, kurang korelasi antar variabelnya, lebih banyak derajat kebebasannya, dan lebih efisien.

3. Lebih sesuai untuk mempelajari perusahaan secara dinamis, misalnya untuk mempelajari pengangguran perpindahan pekerjaan atau mobilitas tenaga kerja.
4. Data panel dapat mendeteksi dan mengukur efek suatu data yang tidak dapat diukur oleh data berkala dan data individual, misalnya pengukuran efek undang-undang upah minimum Kabupaten/Kota dapat dipelajari dengan baik jika kita mengikutkan variabel gelombang kenaikan upah minimum kabupaten/kota dalam setiap wilayah.
5. Data panel juga dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku, misalnya pembelajaran fenomena perubahan skala ekonomi dan teknologi dapat dilakukan dengan baik oleh data panel daripada data berkala atau data individual.
6. Dengan membuat data untuk beberapa ribu unit, data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin terjadi apabila membahasnya dalam bentuk agregat.

Adapun model data panel, persamaan dari data tersebut adalah :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \mu_t; t=1,2,\dots, N, \dots \dots \dots (3.1)$$

Sedangkan persamaan model data panel menggunakan *cross section* sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \mu_i; i=1,2,\dots, N, \dots \dots \dots (3.2)$$

Maka model data panel ditulis:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{it} + \mu_{it}; i=1,2,\dots, N; t=1,2,\dots, T, \dots \dots \dots (3.3)$$

Dimana :

T = Jumlah waktu

N = Jumlah observasi

NxT = Jumlah data panel

Dalam penelitian ini Kemiskinan merupakan fungsi dari UMK, IPM, dan Pengangguran. Maka dapat ditulis :

$$P M_{it} = f (UMK_{it} . IPM_{it} . Pgg_{it}), \dots \dots \dots (3.4)$$

Dalam persamaan f diatas kemudian ditransformasikan ke model ekonometrika sebagai berikut :

$$P M_{it} = \beta_0 + \beta_1 UMK_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 Pgg_{it} + \varepsilon_{it}, \dots\dots\dots (3.5)$$

Dimana :

t = time series

β = Konstanta

ε = Error term

Dalam analisis model panel data dikenal dua macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan *fixed effect*, dan pendekatan efek acak *random effect*. Kedua pendekatan yang dilakukan dalam analisis panel data, antara lain (Nurchayono, 2014: 24):

1. *Fixed Effect*

Asumsi yang dipakai dalam model regresi *fixed effect*, bahwa intersep adalah berbeda antara individu sedangkan slopenya tetap sama antara individu. Untuk mengestimasi model *fixed effect* adalah dengan cara menggunakan metode teknik variabel *dummy* untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik *Leas Square Dummy Variabels (LSDV)*.

2. *Random Effect*

Dimasukkannya variabel *dummy* da dalam model *fixed effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error term*) dikenal sebagai metode *random effect*.

Pada analisis data panel ada empat pertimbangan pokok untuk memilih antara menggunakan metode pendekatan *fixed effect* atau *random effect*, antara lain (Nurchayono, 2014: 25):

1. Apabila jumlah *time-series* (T) besar sedangkan jumlah *cross-section* (N) kecil, maka hasil *fixed effect* dan *random effect* tidak jauh berbeda sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung yaitu *fixed effect model (FEM)*.

2. Apabila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (random) maka *random effect* harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan *fixed effect*.
3. Apabila komponen error (ϵ) individual berkolerasi maka penaksir *random effect* akan bias dan penaksir *fixed effect* tidak bias.
4. Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari *random effect* dapat terpenuhi, maka *random effect* lebih efisien dibandingkan *fixed effect*.

3.3.2 Uji Kesesuaian Model

Pengujian dalam analisis ini menggunakan *Hausman test* atau uji Hausman untuk mengetahui kesesuaian model dari ketiga metode teknik estimasi data panel tersebut. Uji Hausman adalah pengujian statistik sebagai dasar dalam pemilihan model menggunakan *fixed effect* dan *random effect*. Statistik uji hausman mengikuti *chi square* dengan *deggre of freedom* sebanyak jumlah variabel bebas dari model. Dengan ketentuan H_0 dari uji hausman yaitu *random effect* dan H_1 dari *fixed effect*. Apabila dari hasil *Hausman test* menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Sehingga dengan demikian hipotesis nol ditolak dan model yang digunakan *fixed effect*.

3.3.3 Uji Statistik

Tujuan dilakukannya uji statistik guna dapat mengetahui besarnya masing-masing koefisien dari variabel-variabel bebas yaitu upah minimum kabupaten/kota, indeks pembangunan manusia dan pengangguran serta koefisien dari variabel terikat yaitu kemiskinan dengan melakukan uji secara parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi berganda (R^2) (Kisnanto, 2013: 21).

A. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel *independent* yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel *dependent*. Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - R^2 / (N - 1)}$$

Keterangan:

k = Jumlah variabel yang diestimasi termasuk konstanta.

N = Jumlah observasi.

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

1. Ho diterima dan Hi ditolak apabila $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. Ho ditolak dan Hi diterima apabila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

B. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh *independent* terhadap variabel *dependent* secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Nilai t-hitung dapat dicari dengan rumus (Ariefianto, 2102: 27)

$$t = \frac{\beta_i - \beta_i^*}{SE(\beta_i)}$$

Keterangan:

- β_i = Parameter yang diestimasi.
 β_i^* = Nilai hipotesis dari β_i ($H_0 : \beta_i = \beta_i^*$)
 $SE(\beta_i)$ = Simpangan baku β_i

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya salah satu variabel *independent* mempengaruhi variabel *dependent* secara signifikan.
2. Jika $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima, artinya salah satu variabel *independent* tidak mempengaruhi variabel *dependent* secara signifikan.

C. Pengujian Menggunakan Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Konsep *Ordinary Least Square* (OLS) adalah meminimumkan residual, sehingga diperoleh korelasi yang tinggi antar variabel *dependent* dan variabel *independent*. Nilai R^2 yang sempurna dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel *independent* yang dimasukkan dalam model dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Nilai R^2 yang lebih kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel *independent* dalam menjelaskan variasi variabel *dependent* sangat terbatas.
2. Nilai R^2 yang mendekati satu, berarti variabel *independent* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel *dependent*.

3.3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan sebelum melakukan analisis data. Agar tercapai suatu estimasi dalam penelitian ini menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) untuk memenuhi persyaratan seluruh asumsi klasik dinamakan estimasi *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) yang merupakan postulasi dari

teorema Gauss Markov (Wardhono, 2005: 54). Dalam mengestimasi parameter regresi menggunakan uji ekonometrika multikolinearitas, heteroskedastistik, autokolerasi dan uji normalitas.

A. Uji Multikolinearitas

Dilakukan uji multikolinearitas karena terdapat hubungan yang erat antara beberapa variabel independen atau semua variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen).

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas dalam persamaan. Mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai R^2 , F hitung serta t hitung. Adapun indikasi-indikasi terjadinya multikolinearitas menurut (Gujarat, 2012 dalam Desmiwati, 2010: 58) adalah sebagai berikut:

1. Jika ditemukan R^2 yang tinggi dan nilai F statistik yang signifikan tetapi sebagian besar nilai t statistik tidak signifikan.
2. Kolerasi sederhana yang relatif tinggi (0,8 atau lebih) antara satu atau lebih pasang variabel bebas. Jika koefisien korelasi kurang dari 0,8 berarti tidak terjadi multikolinearitas.

Terdapat beberapa penyebab multikolinearitas, diantaranya (Ariefianto, 2012: 52) :

1. Cara pengambilan data dan kecilnya ukuran sampel.
2. Pembatas pada model atau populasi yang disampel. Misalnya meregresi konsumsi listrik terhadap Pendapatan dan ukuran rumah. Di sini populasi darimana sampel diperoleh memiliki karakteristik kolineritas, dimana individu yang memiliki Pendapatan tinggi umumnya memiliki rumah berukuran besar.
3. Spesifikasi model, penambahan polynominal (x^2 , x^3 dan seterusnya) berpotensi menimbulkan masalah multikolinearitas terutama jika kisaran nilai x yang dimiliki adalah kecil.

4. *Common trend*, sering terjadi pada data *time series*, banyak variabel seperti GDP, konsumsi agregat, PMA dan sebagainya bergerak searah berdasarkan waktu.

B. Uji Heteroskedastisitas

Ada beberapa metode pengujian heteroskedastisitas yang bisa digunakan diantaranya yaitu Uji Park, Uji Glesjer, melihat pola grafik regresi, dan Uji White. Untuk menguji gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Uji Park. Menurut Gujarati (2010: 180) Uji Park merupakan proses dua tahap, pada tahap pertama kita lakukan regresi OLS dengan mengabaikan heteroskedastisitas, kemudian didapatkan \hat{u}_i^2 . pada tahap kedua dilakukan regresi dan $\ln \hat{u}_i^2 = \alpha + \beta \ln X_i + v_i$. Kriteria pengujian menggunakan Uji Park:

- a. Apabila $\beta \leq 0,05$ maka heteroskedastik terjadi pada data.
- b. Apabila $\beta > 0,05$ maka heteroskedastik tidak terjadi pada data.

Terdapat beberapa alasan mengapa residual regresi bersifat heteroskedastisitas, diantaranya (Arefianto, 2014: 38):

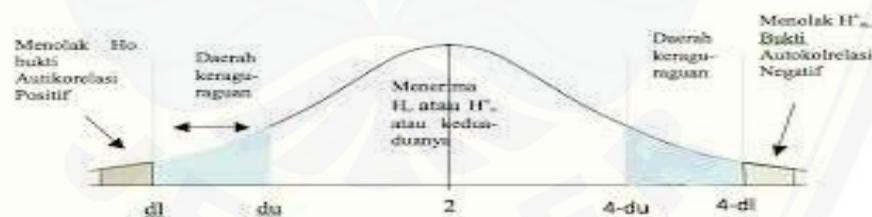
1. Situasi *error learning*, misalnya kita ingin mengetahui hubungan tingkat kesalahan mengetik terhadap berbagai variabel. Jika kita menggunakan sampel yang bersifat panel/*time series* akan sangat mungkin model yang dimiliki akan bersifat heteroskedastisitas.
2. Kemampuan diskresi, hal ini tampak jelas pada penelitian menggunakan variabel Pendapatan. Aktivitas oleh individu yang memiliki Pendapatan tinggi akan jauh lebih variatif dibandingkan mereka yang berpendapatan rendah. Dengan demikian suatu model regresi yang menggunakan variabel semacam ini akan mengalami peningkatan residual kuadrat dengan semakin besarnya Pendapatan.

Menurut Baeti (2013: 93) pada metode pendekatan *fixed effect* estimasi dilakukan dengan pembobot (cross section weight) atau General Least Square (GLS). Pada mode pendekatan *random effect*, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam error.

Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar *uni cross section*. Menurut Suliyanto (2011: 112) masalah heteroskedastisitas nampaknya menjadi lebih biasa dalam data cross section dibandingkan dengan data time series. Heteroskedastisitas berarti bahwa variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi bisa homoskedastisitas yaitu variasi residual sama untuk semua pengamatan. Secara ringkas walaupun terdapat heteroskedastisitas maka penaksir OLS (*Ordinary Least Square*) tetap tidak bias dan konsisten tetapi penaksi tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar.

C. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi biasa digunakan dalam penelitian menggunakan data *time series* dan juga *cross section*. Salah satu uji yang sering digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson*. Uji *Durbin-Watson* sesungguhnya dilandasi oleh model eroro yang mempunyai korelasi. Adapun criteria pengujian autokorelasi dengan menggunakan *Durbin-Watson*, sebagai berikut:



Gambar 3.1 daerah pengujian autokorelasi *Durbin-Watson*

Sumber: Pusattesis.com

Tabel 3.1 Kriteria Pengujian *Durbin-Watson*

Nilai d hitung	Keputusan
$0 \leq dw \leq dl$	Autokorelasi Positif
$dl \leq dw \leq du$	Daerah keragu-raguan
$2 \leq dw \leq 4-du$	Tidak terdapat autokorelasi
$4-du \leq dw \leq 4-dl$	Daerah keragu-raguan
$4-dl \leq dw \leq 4-d$	Autokorelasi negatif

Sumber: Ariefianto (2012: 30)

Rahayu (2009: 17) memberikan pendapatnya mengenai penyebab terjadinya autokorelasi, antara lain; (1) adanya variabel-variabel penjelas yang dihilangkan dari model. Seperti diketahui bahwa kebanyakan variabel-variabel ekonomi cenderung mengandung autokorelasi, dimana nilai-nilai dari periode sekarang akan tergantung pada periode sebelumnya. Jika variabel yang memiliki sifat autokorelasi dihilangkan atau dikeluarkan dari model atau dipisahkan dari sekumpulan variabel penjelas yang lain, maka akan berpengaruh yang direfleksikan dalam variabel gangguan e , sehingga nilai-nilai dari gangguan akan mengandung autokorelasi. Kejadian ini sering disebut “*quasi-autocorrelation*”, karena merupakan pola autokorelasi dari variabel penjelas (X) yang dihilangkan muncul dalam model regresi yang digunakan sehingga tidak menunjukkan pola perilaku dari nilai-nilai e yang sesungguhnya, (2) adanya fenomena *Cobweb*, dimana nilai variabel yang digunakan sekarang bereaksi pada variabel sebelumnya dan (3) dalam analisis regresi yang melibatkan data deret waktu. Jika nilai regresi mengikut sertakan tidak hanya nilai-nilai sekarang, tetapi juga nilai-nilai pada waktu yang lalu sebagai variabel penjelas, maka variabel itu dapat disebut sebagai model distribusi “lags”.

Ariefianto (2012: 27) juga memberikan pendapatnya tentang penyebab autokorelasi, yaitu: *Inertia* salah satu karakteristik umum dari data yang bersifat time series adalah adanya *meria (sluggishness)*. Penyesuaian akibat suatu guncangan terhadap variabel makroekonomi adalah bersifat bertahap dan berlangsung sepanjang waktu tertentu. Hal ini juga terjadi pada sekelompok variabel, dengan demikian kita dapat mengobservasi adanya pergerakan bersama, misalnya: GDP, pengangguran dan tingkat harga yang sebenarnya disebabkan adanya guncangan pada variabel-variabel tersebut dan mereka saat ini berada dalam penyesuaian menuju ekuilibrium. Dalam kondisi ini tentu saja model regresi yang menggunakan variabel-variabel dimaksud akan mengalami autokorelasi.

D. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu yang memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk menguji distribusi data dalam penelitian, normal atau tidaknya data digunakan uji *Jarque-Bera* (J-B test) membandingkan antara nilai J-B (x^2 hitung) terhadap table (*chi-square*). Menurut Umar (2008: 181) ukuran sampel kecil atau pasti (sampel berukuran terhingga), misalkan data yang kurang dari 100 observasi, asumsi kenormalan merupakan sebuah peranan yang sangat penting, apabila ukuran sampel sangat besar, maka asumsi kenormalan dapat diabaikan.

Menurut Wardhono dalam Nurcahyono (2014: 30) kriteria pengujian uji *Jarque-Bera* (J-B test):

- a. Bila nilai J-B hitung \geq nilai X^2 tabel atau nilai probabilitas J-B hitung \leq nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, *error term* adalah berdistribusi normal ditolak.
- b. Bila nilai J-B hitung \leq nilai X^2 tabel atau nilai probabilitas J-B hitung \geq nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, *error term* adalah berdistribusi normal diterima.

3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya

1. Jumlah penduduk miskin adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Data kemiskinan yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kemiskinan Indonesia tahun 2006-2013. (dalam jiwa per tahun). Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
2. Upah Minimum kabupaten/kota (X_1) merupakan pendapatan rata-rata individu di setiap kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini diukur nominalnya tahun 2006-2013. (dalam rupiah per bulan). Sumber: Perpu Daerah.
3. Indeks Pembangunan Manusia (X_2) merupakan tingkat kesejahteraan hidup yang diukur berdasarkan dengan standar *United Nations Development*

Programme (UNDP). Dalam penelitian ini IPM diukur pada tahun 2006-2013. (dalam rasio per tahun). Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

4. Pengangguran (X3) merupakan kendala yang dialami oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Povinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini pengangguran diukur pada tahun 2006-2013. (dalam jiwa per tahun). Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasar analisis yang telah dilakukan pada Bab 4, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Model regresi pengaruh upah minimum kabupaten/kota, indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013 cukup layak digunakan karena telah memenuhi dan melewati uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas.
2. Upah minimum kabupaten/kota (UMK) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif dan signifikan dapat diterima, artinya setiap kali upah minimum kabupaten/kota mengalami penurunan sebesar koefisien $-0,0000914$ akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.
3. Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan ditolak, artinya setiap kali indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan sebesar koefisien $0,008284$ maka jumlah penduduk miskin juga akan mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya kontradiksi dengan upah minimum kabupaten/kota yang tidak diberlakukan di sektor informal.
4. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif dapat diterima, artinya bahwa setiap kali variabel pengangguran mengalami peningkatan sebesar koefisien $0,641247$ maka akan berdampak meningkatnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013.

5. Uji F Statistik menunjukkan bahwa analisis regresi pada tabel diperoleh hasil koefisien determinasi berganda (R^2) sebesar 0,959048, hal ini berarti 95,90% perubahan jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh upah minimum kabupaten/kota, indeks pembangunan manusia dan pengangguran. Sedangkan 4,10% disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam persamaan regresi yang dibuat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat dikemukakan beberapa saran diantaranya:

1. Pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur harus lebih menerapkan upah minimum kabupaten/kota. Penerapan upah minimum kabupaten/kota akan mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan. Masyarakat yang bekerja akan mendapatkan penghasilan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga pada akhirnya akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah sebaiknya melakukan peningkatan terhadap indeks pembangunan manusia melalui faktor kesehatan, pendidikan serta daya beli masyarakat, Pemerintah juga dapat memberikan pelayanan di sektor pendidikan secara gratis dan cuma-cuma khususnya bagi masyarakat miskin. Sehingga kualitas SDM lebih meningkat yang diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Perhatian pemerintah terhadap kesehatan juga masih perlu ditingkatkan dengan pelayanan kesehatan gratis, memperbanyak puskesmas khususnya pada masyarakat desa miskin dan tertinggal.
3. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal pencarian atau kesempatan kerja di daerahnya masing-masing agar terjadi penurunan jumlah kemiskinan misalnya dengan mempermudah izin pendirian usaha agar kesempatan kerja semakin besar, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto, M. D. 2012. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan edisi keempat*. Yogyakarta: STIE-YKPN.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2015. *Jumlah Penduduk Miskin*. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494> (17 Sempetber 2015).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. *Jumlah Penduduk Miskin*. <http://www.jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/182> (17 September 2015)
- Baeti, N. 2013. *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah*. EDAJ 2 (3) (2013) 2252-6889.
- Barika. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengekuan Pemerintah, Pengangguran, dan Inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Se Sumatera*. Bengkulu: Penerbit Program Magister Perencanaan Pemangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan Vol:05. No. 01, Jan-Juni 2013.
- Bappenas. 2002. *Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan*. Jakarta: Sebuah Gagasan Bappenas.
- Bappenas. Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RJJMN 2004-2009. “*Bersama Menata Perubahan*”. Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Cholili, Fatkhul Mufid. 2014. *Analisis Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Desmiwati. 2010. *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Upah Buruh di Indonesia (Analisis Upah Minimum Propinsi Tahun 2001-2008*. Thesisi. Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi.
- Djojohadikusumo, S. 1989. *Kredit untuk Rakyat di Masa Depenresi*. Jakarta: LP3ES.

- Francelari, Purwiyanti Septina. 2012. *Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, Dan Korupsi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (studi kasus: 38 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 dan 2010)*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. N., dan Porter, D. C. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika, edisi 5 buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, D. N., dan Porter, D. C. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika, edisi 5 buku*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, D. N., dan Porter, D. C. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika, edisi 5 buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hudyana, Dadan. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Husman, S. 1996. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Pustak LP3ES Indonesia.
- Khabibi, Achmad. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*. Surakarta: USM.
- Kistanto, I. 2013. *Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember*. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP-AMP.YKPN
- Layard, P. R. G dan A. A. Walters. 1978. *Macro Economy Theory*. Graw: Hill Book Company.
- Mankiw, Gregory. *Makroekonomi edisi keenam*. Terjemahan Fitria Liza dan Imam Nurmawan. 2006. Jakarta: Erlangga.
- Masjkuri, Siti Umajah. 2007. *Perbaikan Kampung Komprehensif dan Dampak terhadap Kesejahteraan Sosial serta Kemandirian Masyarakat Miskin Kumuh di Kota Surabaya*. Disertasi tidak dipublikasikan. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah*

- Tahun 2006-2009*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Nasir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurchayono, E. 2014. *Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi antar Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2012*. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Nurkse, Ragnar. 1953. *Problems of Capital Formation in Under Developed Countries*. New York: Oxford University Press.
- Prastyo, Agus Adit. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang Fakultas Ekonomi.
- Peraturan Republik Indonesia, No. 13. Tahun 2009 tentang. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Di perbanyak oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia*.
- Rahayu, S. 2009. *Penggunaan Metode Durbin Watson dalam Menyelesaikan Model Regresi yang Mengandung Autokoerlasi*. Skripsi. Medan: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara.
- Riberu, J. 1987. *Dasar-dasar Kepemimpinan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Setiawan, dan Dwi Endah. 2010. *Ekonometrika*. Yogyakarta: Andi.
- Suhardjo, A. S. 1997. *Strafikasi Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Di Wilayah Pedesaan, (Kasus Tiga Dusun Wilayah Karang Selatan, Gunung Merapi, Jawa Tengah)*. Majalah Geografi Indonesia. UGM Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono 1994. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Sumarsono, Sony. 2003. *Ekonomi Manusia Sumber Daya Manusia dan Ketenaga Kerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparlan, Parsudi. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Suparlan, Parsudi. 1993. *Pengantar Metode Penelitian Suatu Pendekatan Kualitatif*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- Suryahadi dan Sumarto. 2001. *Memahami Kemiskinan Kronis dan Keniskinan Sementara di Indonesia*. Semeru News Letter, No, 03. Mei-Juni 2000.
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: UPP. AMP YKPN.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Migrasi Urbanisasi dan Pasar Kerja Di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Umar, Husein. 2008. *Metode Riset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wardhono, Adithya. 2005. *Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi*, edisi pertama. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Wiguna Van Indra. 2013. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005-2010*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Yogatama, I Made. 2010. *Pengaruh Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Upah Pekerja, dan Nilai Total Ekspor Terhadap Investasi Asing langsung di Indonesia (1990- 2009)*. Semarang, UNDIP
- Yudha, Okta Ryan Pranata. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Kemiskinan Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-20011*. Semarang: Univesitas Negeri Semarang.
- <http://m.tempo.co/read/news/201401/03/173541819/orang-miskin-jawa-timur-terbanyak-di-indonesia>. (9 Maret 2015)
- http://blh.jatimprov.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=6&Itemid=131 (10 Oktober 2015)

A. Data Penelitian

Lampiran A.1 : Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2013 (dalam ratusan ribu)

No	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kabupaten Bangkalan	306,7	288,3	304	287,6	255,6	239,5	229,0	217,4
2	Kabupaten Banyuwangi	251,9	227,3	206,8	181,0	175,1	164,0	156,6	151,6
3	Kabupaten Blitar	190,4	171,2	150,8	136,8	135,5	126,9	121,2	119,8
4	Kabupaten Bojonegoro	350,9	321,5	292,7	262,0	227,2	212,9	203,3	196,0
5	Kabupaten Bondowoso	183,6	165,7	152,6	138,7	131,9	123,6	118,1	114,8
6	Kabupaten Gresik	287,5	273,6	248,8	225,8	193,9	181,7	173,8	170,9
7	Kabupaten Jember	423,3	417,0	399,5	348,1	311,8	292,1	279,0	277,4
8	Kabupaten Jombang	289,9	261,6	205,6	182,5	166,5	156,0	149,1	137,0
9	Kabupaten Kediri	277,2	267,4	265,5	239,9	232,8	218,1	208,3	201,9
10	Kabupaten Lamongan	304,2	297,6	259,7	235,9	220,6	206,7	197,2	191,3
11	Kabupaten Lumajang	201,9	199,0	180,7	157,8	140,8	131,9	126,0	123,9
12	Kabupaten Madium	144,7	130,6	115,3	105,7	102,3	95,8	91,5	83,4
13	Kabupaten Magetan	113,3	102,2	95,1	84,7	80,3	75,0	71,6	76,0
14	Kabupaten Malang	404,8	365,3	353,3	318,9	306,8	287,4	274,6	287,4
15	Kabupaten Mojokerto	165,4	143,8	142,6	130,1	125,4	117,5	112,3	116,1
16	Kabupaten Nganjuk	255,4	230,5	191,9	167,3	151,7	142,1	135,7	140,2
17	Kabupaten Ngawi	209,1	188,7	169,0	154,1	149,2	137,8	131,2	127,0
18	Kabupaten Pacitan	139,2	125,6	114,4	102,9	105,4	98,7	94,1	91,3
19	Kabupaten Pamekasan	271,5	257,4	213,6	201,0	179,2	167,9	160,3	153,1
20	Kabupaten Pasuruan	308,9	278,7	253,5	219,4	199,3	186,7	178,5	175,0
21	Kabupaten Ponorogo	162,6	157,9	144,5	127,5	113,0	105,9	101,1	102,6

22	Kabupaten Probolinggo	289,7	277,1	305,1	280,1	276,7	259,2	247,6	237,8
23	Kabupaten Sampang	353,1	338,9	302,8	285,0	285,5	267,5	252,6	247,2
24	Kabupaten Sidoarjo	223,3	223,3	144,5	120,9	145,5	136,3	130,0	137,6
25	Kabupaten Situbondo	107,2	93,9	108,9	96,8	105,2	98,6	94,1	90,0
26	Kabupaten Sumenep	351,1	325,5	290,6	265,0	256,7	242,5	231,4	224,6
27	Kabupaten Trenggalek	165,2	149,1	135,2	119,6	108,0	101,2	96,6	92,4
28	Kabupaten Tuban	325,8	297,8	270,5	241,0	225,8	211,5	202,0	196,1
29	Kabupaten Tulungagung	189,0	170,5	119,1	102,0	105,4	98,7	94,3	91,3
30	Kota Batu	21,2	17,3	11,3	8,8	9,7	9,1	8,7	9,3
31	Kota Bitar	15,4	15,2	12	9,8	10,1	9,5	9,1	10,1
32	Kota Kediri	36,4	35,3	30,7	27,5	24,9	23,3	22,3	22,7
33	Kota Madiun	13,8	12,1	11,6	10,3	10,4	9,7	9,3	8,7
34	Kota Malang	59,4	56,6	57,2	44,4	48,5	45,4	43,4	40,9
35	Kota Mojokerto	12,0	11,5	9,8	7,9	8,9	8,3	7,9	8,2
36	Kota Pasuruan	23,6	21,3	18,9	15,8	16,8	15,7	15,0	14,6
37	Kota Probolinggo	38,7	34,9	51,3	47,1	41,4	38,8	40,8	39,0
38	Kota Surabaya	210,8	203,7	209,9	171,2	195,7	183,3	175,1	168,7
	Provinsi Jawa Timur	7678,1	7155,3	6549,3	5860,9	5579,5	5226,8	4992,7	4893,0

Lampiran A.2: Upah minimum kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2013

No	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kabupaten Bangkalan	550.000	586.000	622.000	715.000	755.000	850.000	885.000	983.000
2	Kabupaten Banyuwangi	517.500	567.500	619.000	744.000	824.000	865.000	915.000	1.086.400
3	Kabupaten Blitar	409.200	450.000	501.750	570.000	655.000	750.000	820.000	946.850
4	Kabupaten Bojonegoro	475.000	550.000	630.000	740.000	825.000	870.000	930.000	1.023.500
5	Kabupaten Bondowoso	480.000	495.000	550.000	620.000	668.000	735.000	800.000	946.000
6	Kabupaten Gresik	655.200	743.500	803.652	971.624	1.010.400	1.130.000	1.257.000	1.740.000
7	Kabupaten Jember	525.000	575.000	645.000	770.000	830.000	875.000	920.000	1.091.950
8	Kabupaten Jombang	530.000	640.000	690.000	752.500	790.000	866.500	978.200	1.200.000
9	Kabupaten Kediri	579.000	645.000	717.000	825.000	837.000	934.500	999.000	1.089.500
10	Kabupaten Lamongan	558.000	600.000	650.000	760.000	875.000	900.000	950.000	1.075.700
11	Kabupaten Lumajang	408.000	495.000	550.000	655.000	688.000	740.700	825.391	1.011.950
12	Kabupaten Madiun	400.000	450.000	500.000	620.000	660.000	720.000	775.000	960.750
13	Kabupaten Magetan	596.000	596.000	596.000	645.000	650.000	705.000	750.000	866.250
14	Kabupaten Malang	653.000	743.250	802.000	954.000	1.000.005	1.077.600	1.130.500	1.343.700
15	Kabupaten Mojokerto	655.200	740.000	803.652	971.624	1.009.150	1.105.000	1.234.000	1.700.000
16	Kabupaten Nganjuk	402.000	450.000	510.000	625.000	650.000	710.000	785.000	960.200
17	Kabupaten Ngawi	440.000	460.000	510.000	726.495	685.000	725.000	780.000	900.000
18	Kabupaten Pacitan	405.000	450.000	500.000	600.000	630.000	705.000	750.000	887.250
19	Kabupaten Pamekasan	500.000	560.000	625.000	750.000	900.000	925.000	975.000	1.059.600
20	Kabupaten Pasuruan	655.200	740.000	802.000	955.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000
21	Kabupaten Ponorogo	400.000	450.000	500.000	600.000	635.000	705.000	745.000	924.000
22	Kabupaten Probolinggo	528.000	566.500	604.000	682.500	744.000	814.000	888.500	1.198.600

23	Kabupaten Sampang	450.000	475.000	610.000	650.000	690.000	725.000	800.000	1.104.600
24	Kabupaten Sidoarjo	655.200	743.500	802.000	955.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000
25	Kabupaten Situbondo	436.000	492.500	530.000	610.000	660.000	737.000	802.500	1.048.000
26	Kabupaten Sumenep	490.000	545.000	590.000	690.000	730.000	785.000	825.000	965.000
27	Kabupaten Trenggalek	437.100	640.000	510.000	600.000	635.000	710.000	760.000	903.900
28	Kabupaten Tuban	525.000	606.000	660.000	798.000	870.000	935.000	970.000	1.144.400
29	Kabupaten Tulungagung	460.000	490.000	526.000	600.000	641.000	720.000	815.000	1.007.900
30	Kota Batu	652.000	704.774	737.000	879.000	989.000	1.050.000	1.100.215	1.268.000
31	Kota Blitar	390.000	448.500	506.500	572.500	663.000	737.000	815.000	924.800
32	Kota Kediri	579.000	645.000	717.000	865.000	906.000	975.000	1.037.500	1.128.400
33	Kota Madiun	405.500	464.750	522.750	645.000	685.000	745.000	812.500	953.000
34	Kota Malang	652.000	745.109	802.941	945.373	1.006.263	1.079.887	1.132.254	1.340.300
35	Kota Mojokerto	565.000	656.600	687.500	760.000	805.000	835.000	875.000	1.040.000
36	Kota Pasuruan	580.000	650.000	710.000	805.000	865.000	926.000	975.000	1.195.800
37	Kota Probolinggo	529.000	567.000	604.000	682.500	741.000	810.500	885.000	1.103.200
38	Kota Surabaya	655.500	746.000	805.500	948.500	1.031.500	1.115.000	1.257.000	1.740.000
	Provinsi Jawa Timur	520.595	583.486	632.954	743.648	796.008	863.360	933.120	1.139.539

Lampiran A.3: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2013 (dalam rasio)

No	Kabupaten/Kota	Tahun									
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	Kabupaten Bangkalan	62,72	62,97	63,4	64	64,51	65,01	65,69	66,19		
2	Kabupaten Banyuwangi	66,8	67,24	67,8	68,36	68,89	69,58	70,53	71,02		
3	Kabupaten Blitar	72,05	72,28	72,74	73,22	73,67	74,06	74,43	74,92		
4	Kabupaten Bojonegoro	64,93	65,5	65,83	66,38	66,92	67,32	67,74	68,32		
5	Kabupaten Bondowoso	60,36	60,76	61,26	62,11	62,94	63,81	64,98	65,39		
6	Kabupaten Gresik	72,51	73	73,49	73,98	74,47	75,17	75,97	76,36		
7	Kabupaten Jember	63,04	63,27	63,71	64,33	64,95	65,53	65,99	66,6		
8	Kabupaten Jombang	70,29	71,44	71,85	72,33	72,7	73,14	73,86	74,47		
9	Kabupaten Kediri	69,34	70,39	70,85	71,33	71,75	72,28	72,72	73,29		
10	Kabupaten Lamongan	67,41	67,88	68,33	69,03	69,63	70,52	71,05	71,81		
11	Kabupaten Lumajang	65,9	66,2	66,65	67,26	67,82	68,55	69	69,5		
12	Kabupaten Madiun	67,75	68,24	68,83	69,28	70,18	70,5	70,88	71,46		
13	Kabupaten Magetan	70,55	71,2	71,79	72,32	72,72	73,17	73,85	73,34		
14	Kabupaten Malang	68,39	69,07	69,55	70,09	70,54	71,17	71,94	72,34		
15	Kabupaten Mojokerto	70,61	71,99	72,51	72,93	73,39	73,89	74,42	75,26		
16	Kabupaten Nganjuk	68,47	69,25	69,73	70,27	70,76	71,48	71,96	72,49		
17	Kabupaten Ngawi	65,96	67,52	68,02	68,41	68,82	69,73	70,2	70,86		
18	Kabupaten Pacitan	69,78	70,48	70,91	71,45	72,07	72,48	72,88	73,36		
19	Kabupaten Pamekasan	61,98	62,49	63,13	63,81	64,6	65,48	66,51	67,17		
20	Kabupaten Pasuruan	65,29	65,52	66,02	66,84	67,61	68,24	69,17	69,77		
21	Kabupaten Ponorogo	67,13	68,55	69,07	69,75	70,29	71,15	71,91	72,61		

22	Kabupaten Probolinggo	60,63	60,97	61,44	62,13	62,99	63,84	64,35	65,19
23	Kabupaten Sampang	56,27	56,99	57,66	58,68	59,7	60,78	61,67	62,39
24	Kabupaten Sidoarjo	74,54	74,87	75,35	75,88	76,35	76,9	77,36	78,15
25	Kabupaten Situbondo	61,79	62,64	63,06	63,69	64,26	64,67	65,06	65,73
26	Kabupaten Sumenep	63,08	63,71	64,24	64,82	65,6	66,01	66,41	66,89
27	Kabupaten Trenggalek	71,22	71,68	72,15	72,72	73,24	73,66	74,45	74,44
28	Kabupaten Tuban	66,46	66,61	67,02	67,68	68,31	68,71	74,09	70,04
29	Kabupaten Tulungagung	70,7	72	72,45	72,93	73,34	73,76	69,18	74,79
30	Kota Batu	71,45	72,83	73,33	73,88	74,45	74,93	75,42	76,09
31	Kota Bitar	75,58	75,88	76,6	76,98	77,42	77,89	78,31	78,7
32	Kota Kediri	73,59	74,45	75,11	75,68	76,28	76,79	77,2	77,8
33	Kota Madiun	74,35	75,42	75,89	76,23	76,61	77,07	77,5	78,17
34	Kota Malang	75,34	75,72	76,19	76,69	77,2	77,76	78,43	78,78
35	Kota Mojokerto	75,15	75,66	76,11	76,43	77,02	77,5	78,01	78,66
36	Kota Pasuruan	71,98	72,2	72,6	73,01	73,45	73,89	74,33	74,75
37	Kota Probolinggo	71,51	72,76	73,29	73,73	74,33	74,85	75,44	75,94
38	Kota Surabaya	75,11	75,87	76,36	76,82	77,28	77,85	78,33	78,97
	Provinsi Jawa Timur	68,4	69,1	69,6	70,1	70,7	71,3	71,9	72,4

Lampiran A.4: Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2013 (dalam puluhan ribu)

No	Kabupaten/Kota	Tahun									
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	Kabupaten Bangkalan	59,3	34,4	32,6	23,7	25,0	16,9	24,2	31,9		
2	Kabupaten Banyuwangi	55,1	49,2	48,4	34,5	32,4	30,4	29,6	40,6		
3	Kabupaten Blitar	34,1	27,9	25,5	18,4	13,3	21,3	18,0	23,0		
4	Kabupaten Bojonegoro	58,2	38,8	40,6	30,7	20,7	27,7	22,8	39,9		
5	Kabupaten Bondowoso	11,7	14,3	11,1	110,6	6,4	11,2	15,1	7,9		
6	Kabupaten Gresik	43,1	47,3	44,4	41,6	45,2	26,7	37,5	27,6		
7	Kabupaten Jember	125,4	67,1	55,5	55,0	31,5	47,7	44,1	45,6		
8	Kabupaten Jombang	56,4	45,3	39,4	42,9	32,2	26,3	40,3	32,8		
9	Kabupaten Kediri	64,7	68,8	58,1	39,4	28,6	35,9	32,9	36,6		
10	Kabupaten Lamongan	61,9	41,0	41,5	32,1	21,6	28,0	30,8	31,7		
11	Kabupaten Lumajang	41,7	25,1	22,4	11,8	15,4	14,4	24,5	10,4		
12	Kabupaten Madiun	40,1	35,8	30,5	21,2	19,3	12,1	15,0	16,9		
13	Kabupaten Magetan	22,9	21,9	16,3	14,8	9,2	10,5	13,6	10,5		
14	Kabupaten Malang	100,3	83,8	82,0	80,9	56,4	60,0	49,5	67,1		
15	Kabupaten Mojokerto	42,1	36,2	38,2	30,3	26,4	23,4	18,7	16,9		
16	Kabupaten Nganjuk	41,5	36,8	33,4	22,4	18,4	25,7	22,1	25,7		
17	Kabupaten Ngawi	41,6	32,2	37,8	22,1	21,5	18,2	12,7	23,5		
18	Kabupaten Pacitan	11,8	10,3	11,7	5,0	3,0	7,9	3,9	3,4		
19	Kabupaten Pamekasan	24,7	19,1	15,6	10,2	15,5	11,6	10,5	10,4		
20	Kabupaten Pasuruan	65,4	62,3	53,9	40,0	27,7	38,5	51,7	35,7		
21	Kabupaten Ponorogo	31,6	26,4	19,1	18,7	18,9	20,6	16,1	15,8		

22	Kabupaten Probolinggo	30,8	20,9	20,3	15,7	12,2	18,2	12,4	20,2
23	Kabupaten Sampang	17,8	9,0	16,0	8,1	7,9	16,5	8,5	21,8
24	Kabupaten Sidoarjo	81,0	115,4	110,1	93,3	83,6	48,4	50,8	42,4
25	Kabupaten Situbondo	19,8	19,9	14,3	8,4	11,3	16,8	11,6	10,7
26	Kabupaten Sumenep	42,4	20,6	24,1	13,8	11,3	21,2	7,5	15,8
27	Kabupaten Trenggalek	22,7	20,5	15,0	16,0	8,3	11,6	12,8	16,8
28	Kabupaten Tuban	37,7	35,9	33,9	25,4	17,1	25,1	24,4	26,3
29	Kabupaten Tulungagung	35,5	26,1	23,6	27,0	19,0	18,5	17,3	14,9
30	Kota Batu	8,2	10,1	8,7	7,1	5,4	4,5	3,5	2,4
31	Kota Bitar	5,9	5,6	4,7	5,9	4,4	2,8	2,3	4,2
32	Kota Kediri	16,0	16,2	15,8	11,2	9,9	6,9	10,9	10,9
33	Kota Madiun	13,4	12,6	10,9	9,8	8,3	4,6	5,6	5,9
34	Kota Malang	54,7	45,2	45,3	43,6	34,1	22,2	31,8	33,3
35	Kota Mojokerto	6,1	6,9	7,4	5,7	4,6	3,7	4,7	3,7
36	Kota Pasuruan	11,2	9,4	9,2	6,9	6,0	4,6	4,1	5,2
37	Kota Probolinggo	9,2	10,8	10,7	9,4	5,4	4,6	5,6	4,7
38	Kota Surabaya	128,8	157,1	167,9	118,4	91,4	75,9	72,0	77,9
	Provinsi Jawa Timur	1.574,8	1.366,2	1.295,9	1.132,0	828,8	821,1	819,4	871,0

B. Uji Data Panel

Lampiran B.1: Uji Haustman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10,774398	3	0,0130

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
UMK	-0,000091	-0,000088	0,000000	0,0082
IPM	0,008284	0,008663	0,000000	0,0095
PE	0,641247	0,738510	0,001122	0,0037

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: JML_MISKIN

Method: Panel Least Squares

Date: 04/06/16 Time: 05:49

Sample: 2006 2013

Periods included: 8

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 304

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	209,8199	8,788972	23,87309	0,0000
UMK	-9,14E-05	7,55E-06	-12,11291	0,0000
IPM	0,008284	0,003637	2,277720	0,0235
PE	0,641247	0,134259	4,776177	0,0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0,959048	Mean dependent var	157,9127
Adjusted R-squared	0,952819	S.D. dependent var	98,56152
S.E. of regression	21,40867	Akaike info criterion	9,090332
Sum squared resid	120.541,0	Schwarz criterion	9,591641
Log likelihood	-1.340,730	Hannan-Quinn criter,	9,290867
F-statistic	153,9779	Durbin-Watson stat	0,697479
Prob(F-statistic)	0,000000		

Lampiran B.2: Uji Redudent Fixed Effect

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	114,456163	(37,263)	0,0000
Cross-section Chi-square	863,118922	37	0,0000

Cross-section fixed effects test equation:
 Dependent Variable: JML_MISKIN
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/06/16 Time: 05:53
 Sample: 2006 2013
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 304

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	144,4301	16,45580	8,776852	0,0000
UMK	-6,14E-05	1,96E-05	-3,137159	0,0019
IPM	0,026003	0,013210	1,968427	0,0499
PE	2,066804	0,192173	10,75490	0,0000
R-squared	0,299627	Mean dependent var		157,9127
Adjusted R-squared	0,292623	S,D, dependent var		98,56152
S,E, of regression	82,89585	Akaike info criterion		11,68612
Sum squared resid	2.061.517,	Schwarz criterion		11,73503
Log likelihood	-1.772,290	Hannan-Quinn criter,		11,70568
F-statistic	42,78106	Durbin-Watson stat		0,095153
Prob(F-statistic)	0,000000			

C. Analisis Regresi Data Panel

Lampiran C: Hasil Regresi Data Panel menggunakan Fixed Effect

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/07/16 Time: 06:32

Sample: 2006 2013

Included observations: 8

Cross-sections included: 38

Total pool (balanced) observations: 304

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	209,8199	8,788972	23,87309	0,0000
UMK?	-9,14E-05	7,55E-06	-12,11291	0,0000
IPM?	0,008284	0,003637	2,277720	0,0235
PGG?	0,641247	0,134259	4,776177	0,0000
Fixed Effects (Cross)				
BANGKALAN--C	112,4781			
BANYUWANGI--C	23,37904			
BLITAR—C	-23,38543			
BOJONEGORO--C	94,60502			
BONDOWOSO--C	-15,82482			
GRESIK—C	78,92006			
JEMBER—C	160,0279			
JOMBANG--C	31,48444			
KEDIRI—C	74,93893			
LAMONGAN--C	78,39880			
LUMAJANG--C	-4,513224			
MADIUN—C	-58,91905			
MAGETAN--C	-72,09503			
MALANG--C	156,0090			
MOJOKERTO--C	-3,469659			
NGANJUK--C	1,898725			
NGAWI—C	-9,202567			
PACITAN--C	-49,72626			
PAMEKASAN--C	52,64337			
PASURUAN--C	78,66045			
PONOROGO--C	-40,26175			
PROBOLINGGO--C	118,1118			
SAMPANG--C	135,7052			
SIDOARJO--C	-8,721021			
SITUBONDO--C	-59,29761			
SUMENEP--C	114,7240			
TRENGGALEK--C	-40,04959			
TUBAN—C	92,18844			
TULUNGAGUNG--C	-43,61460			
KOTA BATU--C	-118,1788			

KOTA BLITAR--C	-144,1394
KOTA KEDIRI--C	-112,0897
KOTA MADIUN--C	-145,6116
KOTA MALANG--C	-97,81380
KOTA MOJOKERTO--C	-133,4463
KOTA PASURUAN--C	-120,6003
KOTA PROBOLINGGO--C	-106,0992
KOTA SURABAYA--C	2,886466

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0,959048	Mean dependent var	157,9127
Adjusted R-squared	0,952819	S,D, dependent var	98,56152
S,E, of regression	2,140867	Akaike info criterion	9,090332
Sum squared resid	120.541,0	Schwarz criterion	9,591641
Log likelihood	-1.340,730	Hannan-Quinn criter,	9,290867
F-statistic	153,9779	Durbin-Watson stat	0,697479
Prob(F-statistic)	0,000000		

D. Uji F

Lampiran D: Uji F

Dependent Variable:

JML_MISKIN

Method: Panel Least Squares

Date: 01/02/16 Time: 17:22

Sample: 2006 2013

Periods included: 8

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 304

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0,959048	Mean dependent var	1,579127
Adjusted R-squared	0,952819	S,D, dependent var	9,856152
S.E. of regression	2,140867	Akaike info criterion	9,090332
Sum squared resid	120.541,0	Schwarz criterion	9,591641
Log likelihood	-1,340730	Hannan-Quinn criter,	9,290867
F-statistic	1,539779	Durbin-Watson stat	0,697479
Prob(F-statistic)	0,000000		

E. Uji t

Lampiran E: Uji t

Dependent Variable: JML_MISKIN

Method: Panel Least Squares

Date: 01/02/16 Time: 17:43

Sample: 2006 2013

Periods included: 8

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 304

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	209,8199	8,788972	23,87309	0,0000
UMK	-9,14E-05	7,55E-06	-12,11291	0,0000
IPM	0,008284	0,003637	2,277720	0,0235
PGG	0,641247	0,134259	4,776177	0,0000

F. Koefisien Determinasi

Lampiran F: Uji Koefisien Determinan (Uji R^2)

Dependent Variable:

JML_MISKIN

Method: Panel Least Squares

Date: 01/02/16 Time: 17:22

Sample: 2006 2013

Periods included: 8

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 304

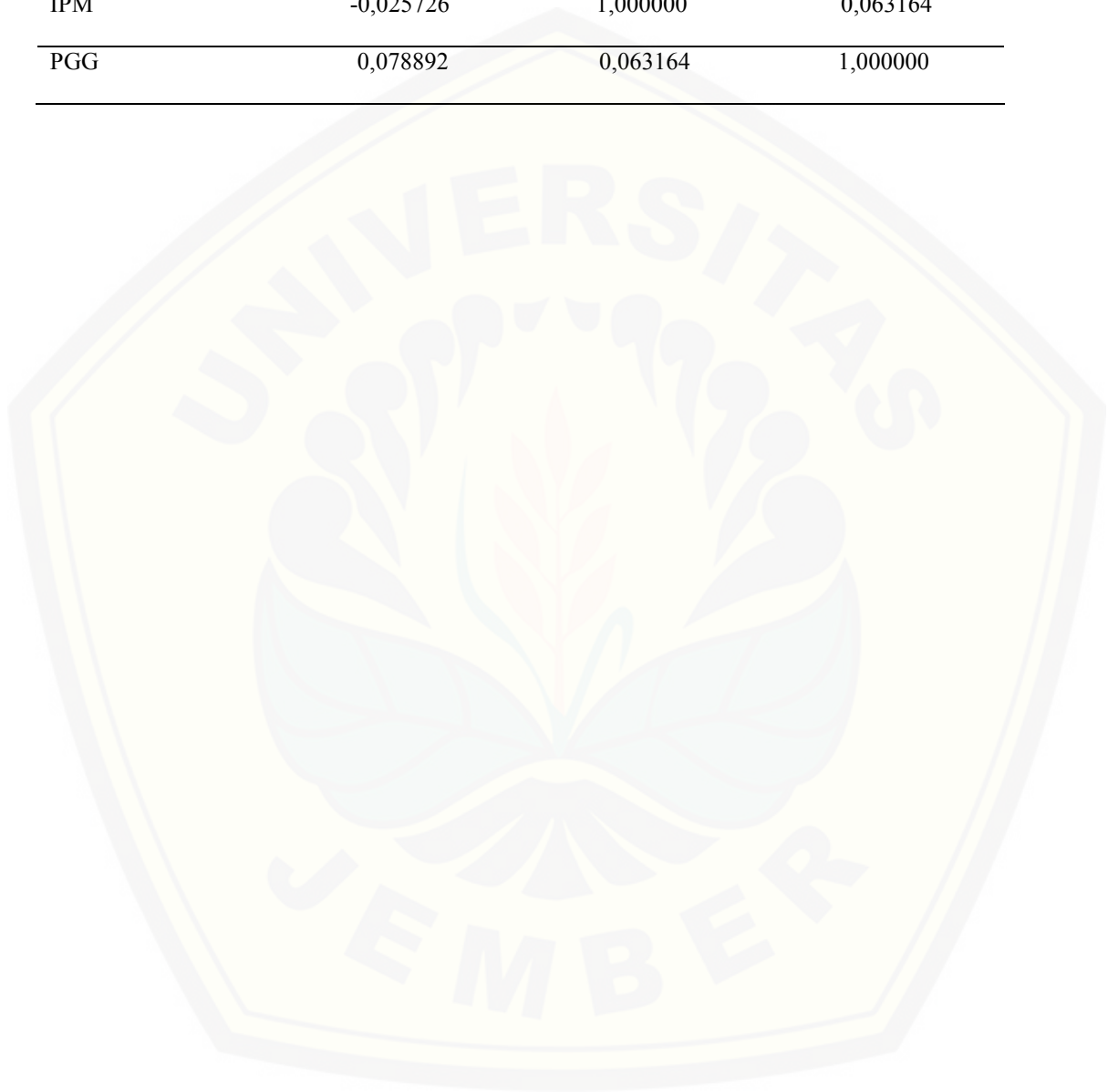
Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0,959048	Mean dependent var	1,579127
Adjusted R-squared	0,952819	S.D. dependent var	9.856152
S.E. of regression	2,140867	Akaike info criterion	9,090332
Sum squared resid	120.541,0	Schwarz criterion	9,591641
Log likelihood	-1,340730	Hannan-Quinn criter.	9,290867
F-statistic	1,539779	Durbin-Watson stat	0,697479
Prob(F-statistic)	0,000000		

G. Uji Multikolinearitas

Lampiran G : Uji Multikolinearitas

	UMK	IPM	PGG
UMK	1,000000	-0,025726	0,078892
IPM	-0,025726	1,000000	0,063164
PGG	0,078892	0,063164	1,000000



H. Uji Heteroskedastisitas

Lampiran H: Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: JML_MISKIN
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 01/02/16 Time: 19:07
 Sample: 2006 2013
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 304
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Weighted Statistics			
R-squared	0,977038	Mean dependent var	2,032358
Adjusted R-squared	0,973546	S.D. dependent var	1,616963
S.E. of regression	2,118831	Sum squared resid	118.072,4
F-statistic	2,797713	Durbin-Watson stat	0,844417
Prob(F-statistic)	0,000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0,958486	Mean dependent var	1,579127
Sum squared resid	122.194,2	Durbin-Watson stat	0,710949

I. Uji Autokorelasi

Lampiran I: Uji Autokorelasi

Dependent Variable:

JML_MISKIN

Method: Panel Least Squares

Date: 01/02/16 Time: 17:22

Sample: 2006 2013

Periods included: 8

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 304

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0,959048	Mean dependent var	1,579,127
Adjusted R-squared	0,952819	S.D. dependent var	9,856,152
S.E. of regression	2,140867	Akaike info criterion	9,090,332
Sum squared resid	120.541,0	Schwarz criterion	9,591,641
Log likelihood	-1,340730	Hannan-Quinn criter.	9,290,867
F-statistic	1,539779	Durbin-Watson stat	0,697479
Prob(F-statistic)	0,000000		

J. Uji Normalitas

Lampiran J: Uji Normalitas

